

PENGELOLAAN OBJEK WISATA LAWANG KUARI OLEH DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
E.K.TERTULIANUS
NIM. E42012084

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : tertulianus94@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Lawang Kuari di Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, yaitu sarana dan prasarana sebagai penunjang daya tarik objek wisata Lawang Kuari, belum adanya pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pembangunan objek wisata Lawang Kuari, belum tersedianya sarana prasarana informasi mengenai objek wisata Lawang Kuari di bidang teknologi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Lawang Kuari sebagai warisan budaya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata.

Kata-kata Kunci: Objek Wisata Lawang Kuari, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata, Kabupaten Sekadau.

MANAGEMENT OF LAWANG KUARI TOURISM OBJECT BY AGENCY OF COMMUNICATION, TELECOMMUNICATION, INFORMATION, CULTURE AND TOURISM OF SEKADAU COUNTY

Abstract

This thesis is based on phenomenon related on Lawang Kuari tourism object in Seberang Kapuas Village, Sekadau Hilir sub District, Sekadau County. The issues are lack of facilities and infrastructures as supported attractiveness of Lawang Kuari tourism object, there is not private investors cooperate with local government in constructing and developing Lawang Kuari tourism object, there is unavailable facilities and infrastructure related on information about Lawang Kuari tourism object in technology field, and lack of participations by societies in managing Lawang Kuari tourism object. This research aims to know Lawang Kuari tourism object management as a cultural heritage belongs to local government of Sekadau County by Agency of Communication, Telecommunication, Information, Culture and Tourism.

Keywords : Lawang Kuari Tourism Object, Agency of Communication, Telecommunication, Information, Culture and Tourism.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dengan objek wisata, keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya dan kehidupan masyarakat yang cukup banyak. Objek wisata yang ada di Indonesia merupakan kekayaan alam yang patut untuk dibanggakan. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan baik dari segi keindahannya maupun adat istiadat yang ada di daerah tersebut yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan fungsi dari kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menyebutkan tujuan dari kepariwisataan adalah:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Menghapus kemiskinan;
- d) Mengatasi pengangguran;
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa;
- h) Memupuk rasa cinta tanah air;
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) Mempererat persahabatan antarbangsa.

Objek wisata Lawang Kuari merupakan objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Sekadau yang cukup menarik karena objek wisata tersebut merupakan cikal-bakal terbentuknya kabupaten Sekadau. Selain itu, objek wisata Lawang Kuari juga memiliki lingkungan yang sangat menarik dan strategis, karena letaknya yang tidak jauh dari pusat kota +/- 5 Km ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit menggunakan *motor air* atau *perahu klotok*. Selain itu, kondisi alamnya yang masih alami dan objek wisata Lawang Kuari tepat berada ditepi sungai yang dapat dimanfaatkan untuk menambah corak keindahan Lawang Kuari tersebut.

Fenomena yang terjadi pada objek wisata Lawang Kuari saat ini semakin memprihatinkan, seperti yang

diberitakan oleh salah satu media massa lokal suarapemredkalbar.com “Goa Lawang Kuari, Ikon Kabupaten Sekadau Kian Memprihatinkan” (Akhmal Setiadi Musran/ Bob), dijelaskan bahwa kondisi Lawang Kuari sudah memprihatinkan, lingkungan Lawang Kuari tidak terawat secara baik, pohon-pohon tumbang disekitar halaman goa, terdapat banyak coretan dan tumbuhnya semak belukar disetiap sudut goa. Dikatakan juga dalam pemberitaan tersebut bahwa saat ini pengelolaan Lawang Kuari telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau oleh Yayasan Lawang Kuari dengan harapan agar kelestarian ikon daerah tersebut tetap terawat dengan baik.

Fenomena yang terjadi di atas menunjukkan objek wisata Lawang Kuari tidak produktif dan tidak memiliki daya tarik bagi wisatawan baik masyarakat setempat maupun masyarakat di luar daerah Kabupaten Sekadau untuk berkunjung ke Lawang Kuari yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar objek wisata yang tidak terawat, infrastruktur dan pemasaran objek wisata Lawang Kuari yang belum optimal. Fenomena tersebut menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau

karena Lawang Kuari sendiri menjadi nama julukan untuk Kabupaten Sekadau yaitu Bumi Lawang Kuari.

Hasil pra penelitian menunjukkan pengelolaan objek wisata Lawang Kuari masih jauh dari yang diharapkan sehingga objek wisata Lawang Kuari belum memiliki daya tarik bagi wisatawan. Menurut Data Arsip DISHUBTELEINFOBUDPAR Sekadau Tahun 2015 jumlah pengunjung objek wisata Lawang Kuari tahun 2013, 2014, dan 2015 dibawah 100 orang per tahunnya.

Permasalahan yang terjadi pada objek wisata Lawang Kuari merupakan tugas penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Data dari Laporan Akhir Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau tahun 2015 menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata objek wisata Lawang Kuari masih jauh dari yang direncanakan karena semua perencanaan pengembangan objek wisata Lawang Kuari yang telah dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau tahun 2010 - 2015 belum bisa dilaksanakan seperti peningkatan dan perawatan

infrastruktur jalan menuju objek wisata Lawang Kuari, pengembangan dan perawatan lingkungan objek wisata Lawang Kuari, dan pemasaran objek wisata Lawang Kuari.

Kesimpulan penulis dari penjelasan di atas bahwa pengelolaan objek wisata Lawang Kuari menjadi masalah yang sangat mendasar bagi Kabupaten Sekadau, mengingat Lawang Kuari menjadi ikon Kabupaten Sekadau. Penulis menemukan masalah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau. Selain itu pengelolaan pariwisata juga merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 23 Undang Undang nomor 10 Tahun 2009.

2. Fokus Penelitian

Melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi maka penulis mengangkat masalah penelitian yang berjudul Pengelolaan Objek Wisata Lawang Kuari oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau sebagai salah satu bentuk pelestarian aset wisata dan budaya daerah. Fokus penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pada proses pengorganisasian dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang telah dimuat dalam Rencana Strategis namun belum dapat dilaksanakan.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut: Mengapa proses pengorganisasian dalam pengelolaan objek wisata

Lawang Kuari yang dilakukan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau belum optimal ?.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis masalah pada proses pengorganisasian dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis dalam proses pengelolaan objek wisata daerah. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk pencapaian pengembangan dan mencari pemikiran baru mengenai sistem pengelolaan objek wisata daerah khususnya Kabupaten Sekadau.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau, hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pada setiap objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau sehingga menjadi produktif dan memiliki daya tarik bagi wisatawan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Suatu organisasi tidak bisa lepas dari manajemen karena segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam organisasi merupakan bagian dari manajemen. Manajemen dibutuhkan setiap orang, karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan organisasi akan kurang berhasil. Hasibuan (2014:1) menjelaskan "Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur." Secara universal, pengertian manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi. Lebih lanjut lagi Hasibuan (2014:2) menjelaskan "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Istilah manajemen banyak diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda-beda misalnya, pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya.

Pengorganisasian adalah proses kedua dari manajemen setelah proses perencanaan menurut Terry. Pengorganisasian (*organizing*) dan organisasi (*organization*) memiliki arti yang berbeda, organisasi adalah hasil dari pengorganisasian (Hasibuan, 2014:118). Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki organisasi, dan lingkungan yang melingkupi organisasi.

Proses-proses dalam pengorganisasian (*organizing*) yaitu, identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, departementalisasi atau pengelompokan aktivitas atau pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan, pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu, dan koordinasi (Koontz – Wiludjeng, 2007:93). Berikut ini adalah penjelasan proses-proses pengorganisasian menurut Koontz:

1) Identifikasi aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi

Pada proses ini, seorang manajer dalam organisasi menentukan dan memperinci seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam proses perencanaan.

2) Departementalisasi

Proses departementalisasi dapat diartikan pengelompokan atau pembagian pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu bagian atau bidang atas dasar tujuan yang sama (Badrudin, 2015:115). Hasibuan (2014:139) memaparkan ada 10 dasar-dasar departementasi, yaitu berdasarkan:

1. **Enterprise function** (fungsi-fungsi perusahaan)
2. **Management function** (fungsi-fungsi manajemen)
3. **Process product** (proses produksi)
4. **Product** (dasar produk/hasil)
5. **Customer** (dasar pasar/langganan)
6. **Territory** (dasar wilayah/tempat)
7. **Time** (dasar waktu)
8. **Simple number** (dasar jumlah)
9. **Combination**
10. **Matriks**

3) Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang adalah pemberian atau pengalihan kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu kepada orang lain (Wiludjeng, 2007:104). Ada tiga proses pendelegasian wewenang menurut Wiludjeng (2007:104), yaitu:

1. Menentukan hasil yang diharapkan dari suatu posisi.
2. Menugaskan suatu pekerjaan pada posisi tersebut.
3. Mendelegasikan wewenang untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Pendelegasian wewenang yang diberikan seorang manajer

harus jelas agar bawahan sebagai penerima hak tersebut dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan dengan benar. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang bawahan tidak bisa berbuat apa-apa. Pendelegasian wewenang dapat bersifat umum atau khusus, dapat juga bersifat tertulis atau tidak tertulis (Wiludjeng, 2007:104).

4) Koordinasi

Proses koordinasi merupakan proses terakhir dari fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam manajemen menurut Koontz. Wiludjeng (2007:107) menjelaskan bahwa "Koordinasi dapat diartikan sebagai proses menggerakkan segala usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya." Koordinasi merupakan suatu proses kerjasama baik antar bagian atau bidang dalam organisasi maupun kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuannya. Secara ringkas, koordinasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi dapat diartikan juga sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi

maupun orang-orang dalam organisasi yang meliputi pertukaran informasi dan pengambilan keputusan/ kesepakatan, sehingga semua pihak dan keputusan yang diambil tersebut dapat bersinergi dan melaksanakan fungsinya dengan maksimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Pengelolaan Objek Wisata Lawang Kuari Oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan objek wisata Lawang Kuari belum Optimal.

Proses-proses pengorganisasian seperti yang sudah dijelaskan di atas harus dilaksanakan secara baik dan benar agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teori *Organizing* yang dijelaskan oleh Koontz (Wiludjeng, 2007:93)

berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pariwisata merupakan kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan secara optimal. Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Penulis melakukan penelitian terhadap pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan penulis saat penelitian pada tanggal 29 Juli sampai dengan 9 Agustus 2016 masih terdapat masalah dalam pengembangan dan pembangunan pada proses pengelolaan objek wisata Lawang Kuari.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata dalam proses pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang terletak di Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ialah:

a. Sarana dan prasarana belum memadai

Kondisi seperti ini akan membuat kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing merasa terbatas dan juga membuat objek wisata Lawang Kuari kurang memiliki daya tarik. Sarana dan prasarana yang tersedia pada lingkungan objek wisata sangat berpengaruh terhadap daya tarik objek wisata tersebut, maka dari itu sarana dan prasarana yang tersedia pada objek wisata harus memadai sebagai penunjang daya tarik objek wisata tersebut.

b. Belum adanya pihak swasta yang mau bekerjasama (investor)

Salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan objek wisata Lawang Kuari belum terlaksana secara optimal ialah belum adanya pihak swasta atau investor yang mau bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Budaya dan Pariwisata. Pihak swasta merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan, dengan

kehadiran pihak swasta yang menanamkan modalnya disuatu objek wisata, maka kebutuhan utama seperti pendanaan dalam pembangunan sarana dan prasarana bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

c. Kurangnya informasi sebagai bentuk promosi objek wisata

Kurangnya informasi menyangkut objek wisata Lawang Kuari merupakan salah satu penyebab dalam permasalahan daya tarik objek wisata tersebut. Penyediaan informasi sangat diperlukan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu objek wisata sehingga menarik wisatawan untuk mengunjunginya.

Pada zaman modern ini penyampaian informasi sangat mudah dan cepat karena ditunjang dengan teknologi yang semakin maju. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau harus dapat menyediakan sarana informasi mengenai objek wisata yang ada pada lingkup wilayah Kabupaten Sekadau dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai salah satu bentuk pengembangan dan pembangunan dalam bidang pariwisata.

d. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dapat berpengaruh terhadap proses pengelolaan suatu objek wisata,

karena tanpa adanya peran serta dari masyarakat proses pengelolaan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan objek wisata tidak akan terlaksana secara optimal. Salah satu contoh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata ialah tidak adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dari masyarakat sekitar wilayah objek wisata Lawang Kuari.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) memiliki peranan penting dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam mengelola objek wisata Lawang Kuari. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai salah satu sarana koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk saling membantu dalam pengelolaan di bidang kepariwisataan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses pengorganisasian dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari yang kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori *Organizing* oleh Koontz (Wiludjeng, 2007:93).

1. Identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi

Agar tercapainya tujuan, suatu organisasi harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan segala kegiatan kemudian menyusun daftar kegiatan tersebut (Badrudin, 2015:115). Proses pengelolaan objek wisata Lawang Kuari selalu terkendala oleh permasalahan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Maka dari itu Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata sebagai organisasi pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari harus melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Hasil wawancara dengan informan bahwa Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau telah membuat *master plan* sebagai bentuk dari identifikasi aktifitas dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari namun hal tersebut belum dapat diterapkan karena masih terdapat kendala antara lain dana yang dimiliki pemerintah daerah dan belum adanya investor yang mau bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari.

2. Departementalisasi

Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu bagian atau bidang atas dasar tujuan yang sama (Badrudin, 2015:115). Departementalisasi dapat juga diartikan sebagai pemberian atau pembebanan tugas dari seorang manajer kepada bawahan yang ditempatkan di bagian penanganan tugas. Pembebanan tugas pengelolaan kepariwisataan pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau adalah pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dibantu oleh Seksi Kebudayaan dan Seksi Pariwisata. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata melalui Bidang Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau termasuk dalam pembangunan dan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan.

Dari penjelasan informan, penenliti dapat mengambil kesimpulan bahwa departementalisasi pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata sudah cukup baik, dimana tugas yang berkaitan dengan pengelolaan budaya dan pariwisata dibebankan kepada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata,

kemudian dalam pelaksanaan tugasnya bidang tersebut dibantu oleh Seksi Kebudayaan dan Seksi Pariwisata. Sekretaris Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau kembali menyampaikan bahwa permasalahan yang ada bukanlah pada bidang-bidang yang tersedia namun pada ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Hal tersebut ditunjukkan oleh struktur organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau dimana masih terdapat pengisian jabatan yang belum sesuai dengan bidang yang ditangani.

3. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian Wewenang merupakan pemberian tugas dari seroang pimpinan organisasi kepada bawahan yang merupakan tindak lanjut dari proses departementalisasi (Badrudin, 2015: 150). Setelah proses departementalisasi dilaksanakan maka seorang pimpinan organisasi mendelagasikan kewenanngan kepada bawahan yang ada pada bidang pekerjaan tersebut sehingga bawahan tersebut menjalankan tugas dengan menggunakan kekuasaan yang

diterimanya. Seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan tugas kepada setiap bawahan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bawahannya. Selain itu, seorang pimpinan organisasi harus menempatkan bawahannya pada bidang atau bagian yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bawahannya.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2008 merupakan bentuk nyata pelimpahan tugas kepada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata untuk menangani pengelolaan kepariwisataan, namun Peraturan Bupati Sekadau tersebut masih dirasa kurang cukup untuk menjadi tolak ukur untuk melaksanakan tugas pengelolaan pariwisata, perlu juga adanya peraturan daerah terkait pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sekadau karena peraturan daerah merupakan produk hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pengelolaan pariwisata yang ada dalam lingkup Kabupaten Sekadau dapat dilaksanakan dengan asas-asas yang terdapat pada peraturan daerah tersebut.

4. Koordinasi

Pengertian dari koordinasi adalah proses menggerakkan segala usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana

mestinya (Wiludjeng, 2007:107). Koordinasi merupakan suatu proses kerjasama baik antar bagian atau bidang dalam organisasi maupun kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuannya. Secara ringkas, koordinasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Permasalahan utama yang dialami Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata ialah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan dari pengelolaan objek wisata Lawang Kuari. Sampai sejauh ini belum ada pihak investor yang mau diajak bekerjasama dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Lawang Kuari hal itu juga menjadi satu penyebab terkendalanya pengelolaan objek wisata Lawang Kuari. Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam mengoptimalkan pengelolaan Lawang Kuari agar semua perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dapat diwujudkan.

Partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengelolaan tersebut, karena tanpa adanya peran aktif dari masyarakat sehingga pengelolaan tersebut dapat berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada saat penelitian dilapangan, peneliti tidak

menemukan adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sedangkan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan kelompok yang terbentuk dari masyarakat sekitar wilayah objek wisata sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata daerah. Hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sekitar objek wisata.

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata perlu untuk melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap objek wisata Lawang Kuari, sehingga masyarakat lebih dapat mengerti akan dampak dari kegiatan pariwisata. Suatu daerah perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai wujud kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengelola objek wisata, dengan begitu masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik objek wisata di daerahnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pengorganisasian pengelolaan objek wisata Lawang Kuari oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau ialah sebagai berikut:

- a. Proses identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi sudah dilaksanakan dengan adanya *master plan* pembangunan objek wisata Lawang Kuari.
- b. Proses departementalisasi juga sudah dilaksanakan dengan baik karena dalam melaksanakan tugas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan ditangani oleh Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan dibantu oleh Seksi Kebudayaan dan Seksi Pariwisata, akan tetapi masih terdapat kendala dalam penempatan pegawai pada jabatan tersebut karena tidak sesuai dengan keahlian pada bidang yang ditempati yang diakibatkan oleh sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata.

c. Pendelegasian wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata sudah ada melalui Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola kepariwisataan yang ada dalam lingkup Kabupaten Sekadau, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau belum memiliki peraturan daerah tentang kepariwisataan sebagai dasar hukum dalam mengelola sektor-sektor pariwisata.

d. Proses koordinasi yang dilakukan oleh dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari masih terdapat masalah, salah satunya ialah belum adanya pihak swasta atau investor. Hal tersebut berakibat pada ketersediaan dana yang dibutuhkan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Lawang Kuari. Selain itu, belum terjalinnnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan

masyarakat setempat yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Lawang Kuari, hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang terbentuk dari masyarakat Desa Seberang Kapuas.

E. SARAN

Adapun saran dari peneliti terhadap pengelolaan objek wisata Lawang Kuari oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sekadau sebagai unsur pelaksana pemerintahan dalam bidang pariwisata di Kabupaten Sekadau, ialah sebagai berikut:

a. Melihat dari segi faktor yang begitu banyak mempengaruhi proses pembangunan dan pengembangan objek wisata Lawang Kuari yang ada, sebaiknya Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata mengkaji lebih dalam lagi dalam menyusun perencanaan pengembangan dan pembangunan objek wisata Lawang Kuari melalui koordinasi pihak-pihak terkait agar

segala sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan mengutamakan unsur-unsur budaya yang dimiliki objek wisata Lawang Kuari.

- b. Melihat susunan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata sudah cukup baik, namun perlu adanya perekrutan pegawai sesuai dengan keahliannya pada bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau perlu membuat peraturan daerah mengenai kepariwisataan sehingga dapat menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola aspek-aspek pariwisata yang ada dalam lingkup Kabupaten Sekadau.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau harus lebih gencar lagi dalam menarik minat investor sebagai pihak yang bekerjasama dalam penyediaan dana dalam pengelolaan objek wisata Lawang Kuari, sehingga setiap perencanaan untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata Lawang Kuari dapat dilaksanakan dengan optimal. Selain itu, peneliti juga menyarankan perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang kegiatan pariwisata yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam memberikan gambaran umum tentang manfaat dan tujuan pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pariwisata. Kegiatan tersebut juga merupakan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk membentuk kemitraan bersama masyarakat dalam mengelola objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari dalam pelaksanaan penelitian ini masih terdapat kendala, sehingga menimbulkan kesulitan bagi peneliti dalam membuat skripsi ini. Kendala yang dialami peneliti ialah:

- a. Akomodasi yang cukup mahal bagi peneliti untuk menuju objek wisata yang diteliti, sehingga peneliti hanya dapat mengunjungi objek wisata satu kali saja dalam pelaksanaan penelitian ini.
- b. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat yang menyebabkan peneliti mengalami

kesulitan untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk penulisan.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Soekadijo, R.G. 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Grramedia Pustaka Utama.

G. REFERENSI

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Affif, Faisal., Ismeth Abdullah. 2010. *Manajemen Straegik Keorganisasian Publik*. Bandung : Refika Aditama.

Amir. M.Taufik. 2011. *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014.

Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Kencana.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakrta : Penerbit Erlangga.

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Oka, A. Yoeti. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Paramita.

Sugiantoro, Ronny. 2000. *Pariwisata: Antara Obsesi & Realita*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Terry, George R., Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Skripsi:

Assakinah. 2015. *Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Dalam Meningkatkan Sadar Wisata di Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.

Syaputra, Azan. 2012. *Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengelolaan Pariwisata di Pantai Pulau Datuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.

Tri Ubargi, Syahrul. 2013. *Efektivitas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sintang*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.

Rujukan Regulasi :

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Susunan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : E.K.TERTULIANUS
NIM / Periode Lulus : E42012084 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : tertulianus94@gmail.com / 085845101294

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA LAWANG KUARI OLEH DINAS PERHUBUNGAN,
TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau pencerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : November 2016

(E.K. Tertulianus)